

TESIS

**KARAKTERISTIK KERJASAMA PENJUALAN BAHAN BAKAR MINYAK
(Analisis Bentuk Hubungan Hukum Pertamina dan Pertashop dalam
Penjualan Bahan Bakar Minyak)**



Oleh :

**DEWI RUMAISSA, S.H., M.H.
NIM. 032014253032**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

**KARAKTERISTIK KERJASAMA PENJUALAN BAHAN BAKAR MINYAK
(Analisis Bentuk Hubungan Hukum Pertamina dan Pertashop dalam
Penjualan Bahan Bakar Minyak)**

TESIS

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Airlangga**

OLEH :

**DEWI RUMAISA, S.H., M.H.
NIM. 032014253032**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

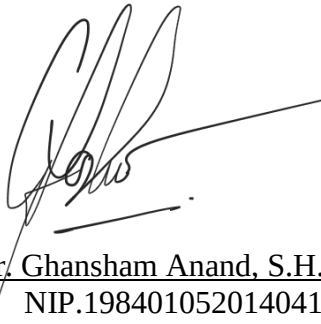
Tesis ini telah disetujui,
Tanggal 19 Januari 2022

Dosen Pembimbing Utama :



Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M
NIP. 198402172006041001

Dosen Pembimbing Kedua :



Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn.
NIP.198401052014041003

Mengetahui :

Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga



Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H.
NIP. 198003202005012002

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji,
pada tanggal 19 Januari 2022**

TIM PENGUJI TESIS :

**Ketua : Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M.
NIP. 198109152006041002**

**Anggota : 1. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.
NIP. 196504191990021001**

**2. Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 198402172006041001**

**3. Dr. Ghansham Anand, S.H., M. Kn.
NIP. 198401052014041003**

**4. Erni Agustin, S.H., LL.M.
NIP. 198308102006042001**

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dewi Rumaisa, S.H., M.H.
NIM : 032014253032

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari hasil karya orang lain. Tesis ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Airlangga, maupun di Perguruan Tinggi lainnya;
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan;
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Tesis ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma pengaturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 19 Januari 2022
Yang membuat pernyataan,



Dewi Rumaisa, S.H., M.H.
NIM. 032014253032

MOTTO

Allah Tuhanku Yang Maha Baik ♥

ABSTRAK

Minyak bumi dan gas bumi merupakan salah satu sumber devisa negara yang penting dalam kegiatan pembangunan nasional yang dilaksanakan secara bersinergi antara pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 Tentang Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara menyatakan bahwa Pemerintah memberikan wewenangnya berupa kuasa pertambangan kepada Pertamina. Sejalan dengan program Pertamina *One Village One Outlet* (OVOO) dalam rangka memastikan pelayanan Pertamina hingga ke pedesaan, Pertamina menawarkan produk terbaru yang diberi nama PERTASHOP (Pertamina Shop) kepada masyarakat. Hingga saat ini, landasan beroperasionalnya Pertashop masih berwujud Izin Operasional Pertashop. Selain itu, Pengusaha Pertashop sering mendapati *losses* yang tinggi saat pengiriman Bahan Bakar Minyak melalui PT Patra Niaga selaku transportir. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Tesis ini membahas mengenai kekuatan mengikat Izin Operasional Pertashop sebagai dasar hubungan hukum para pihak dan tanggung gugat Pertamina terhadap Petrashop dalam sengketa pendistribusian Bahan Bakar Minyak. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Izin Operasional Pertashop bukanlah suatu perjanjian, melainkan sebagai syarat persetujuan atau kesepakatan dari Pertamina yang pada akhirnya akan melahirkan Perjanjian Kerjasama. Hubungan hukum antara Pertamina dan Pengusaha Pertashop telah melahirkan perikatan yang bersumber dari persetujuan sehingga melahirkan perbuatan yaitu pendistribusian Bahan Bakar Minyak. Penyelesaian wanprestasi dalam sengketa pendistribusian Bahan Bakar Minyak dapat melakukan musyawarah mufakat, Alternatif Penyelesaian Sengketa atau gugatan di peradilan umum.

Kata Kunci : Bahan Bakar Minyak, Pertamina, Pertashop, Wanprestasi.

ABSTRACT

Oil and gas are one of the important sources of foreign exchange in national development activities carried out in synergy between the government and the community. Based on Article 2 of Law Number 8 of 1971 concerning State Oil and Gas Mining Companies, it is stated that the Government has given its authority in the form of mining authorization to Pertamina. In line with the Pertamina One Village One Outlet (OVOO) program in order to ensure Pertamina services to the countryside, Pertamina offers the latest product, named PERTASHOP (Pertamina SHOP) to the public. Until now, the operational basis of Pertashop is still in the form of Pertashop Operational Permit. In addition, Pertashop entrepreneurs often encounter high losses when shipping fuel oil through PT Patra Niaga as the transporter. This research is a legal research that uses a statutory approach and a conceptual approach. This thesis discusses the binding power of Pertashop's Operational Permit as the basis for the legal relationship between the parties and Pertamina's accountability to Petrashop in disputes over the distribution of fuel oil. The results of this study state that the Pertashop Operational Permit is not an agreement, but as a condition of approval or agreement from Pertamina which will eventually give birth to a Cooperation Agreement. The legal relationship between Pertamina and Pertashop Entrepreneurs has given birth to an engagement from an agreement so that it gives birth to an act, namely the distribution of fuel oil. Settlement of default in disputes over the distribution of Fuel Oil can be done through deliberation to reach consensus, Alternative Dispute Resolution or lawsuits in general courts.

Keyword : Fuel Oil, Pertamina, Pertashop, Default.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, atas ridho serta rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
2. Ibu Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H. dan Oemar Moechthar, S.H., M.Kn. selaku koordinator dan sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan;
3. Bapak Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M. selaku dosen pembimbing tesis I dan anggota tim penguji tesis;
4. Bapak Dr. Ghansham Anand, S.H., M. Kn. selaku dosen pembimbing tesis II dan anggota tim penguji tesis;
5. Bapak Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M. selaku ketua tim penguji tesis;
6. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H. dan Ibu Erni Agustin, S.H., LL.M. selaku anggota tim penguji tesis;
7. Para dosen pengajar pada Program Studi Magister Kenotariatan yang telah memberikan penulis kesempatan untuk kuliah, belajar dan menyelesaikan tesis serta menyelesaikan masa studi tepat waktu;
8. Keluarga penulis, Papa Titis Tjahyo Nugroho Djati, Mama Siti Naimah, Kakak Mahendri Puti Sholichah, S.H., M.Kn. dan adik Reyhan Vegas;

9. Zaki Fathullah, S.H., M.H. yang selalu memberikan semangat, membantu dan menemani dari awal hingga akhir masa studi;
10. Rekan kantor CV Reyhan Vegas, Mas Farid dan Yeni;
11. Rekan kuliah Ni Putu Patsana Anggarwati dan Mentari Putri Lijaya yang selalu kompak dan saling mengingatkan dalam menjalankan suka duka selama perkuliahan ini;
12. Bagian Administrasi MKn, Pak Munib dan Bu Emmy yang selalu membantu terkait administrasi selama perkuliahan.

Semoga amal budi baiknya mendapat balasan dari Allah SWT, dan semoga tesis ini dapat menjadi bacaan yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembacanya.

Surabaya, 19 Januari 2022
Penulis,



Dewi Rumaissa
NIM. 032014253032

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Burgerlijk Wetboek, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.

Nieuw Burgerlijk Wetboek, New Netherlands Civil Code/Dutch Civil Code.

Herzien Inlandsch Reglement. Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44.

Wetboek van Koophandel voor Indonesie. Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 Tentang Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2971.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6571.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573.

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 Tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 69.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 Tentang Badan Pengatur Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/08/2017 Tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas*.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-07/MBU/04/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/08/2017 Tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Grup Perusahaan PT Pertamina (PERSERO)	5
Gambar 2. Skema Tahapan Pembelian Bahan Bakar Minyak	10
Gambar 3. Skema Sumber-Sumber Perikatan	45
Gambar 4. Skema Pola Penjualan FRANCO	71

DAFTAR ISI

COVER	
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PANITIA PENGUJI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah	1
1.2. Tujuan Penelitian	14
1.3. Manfaat Penelitian	14
1.4. Metode Penelitian	14
1.4.1. Tipe Penelitian Hukum	14
1.4.2. Pendekatan Penelitian	15
1.4.3. Sumber Bahan Hukum	16
1.4.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	18
1.4.5. Analisis Bahan Hukum	18
1.5. Sistematika Penulisan	18
BAB II KEKUATAN MENGIKAT IZIN OPERASIONAL PERTASHOP SEBAGAI DASAR HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK	21
2.1. Syarat Keabsahan Izin Operasional Pertashop	21
2.2. Izin Operasional Pertashop Sebagai Dasar Hubungan Hukum Para Pihak	42

2.3. Karakteristik Perikatan antara Pertamina Dan Pertashop Berdasarkan Izin Operasional Pertashop	54
BAB III TANGGUNG GUGAT PERTAMINA TERHADAP PERTASHOP DALAM SENGKETA PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK ..	60
3.1 Penentuan Wanprestasi dalam Sengketa Pendistribusian Bahan Bakar Minyak	60
3.2. Penyelesaian Sengketa atas Wanprestasi Pendistribusian Bahan Bakar Minyak	72
BAB IV PENUTUP	99
4.1 Kesimpulan	99
4.2 Saran	100
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	